PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik

Diajukan Oleh:
M. RIZKY RAYES LESMANA
NIM.07011282126062

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA 2025

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik

Oleh :
M. RIZKY RAYES LESMANA
NIM. 07011282126062

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Katriza Imania., M.Si
NIP. 196810221997022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PENGUATAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG DALAM MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH

SKRIPSI

Oleh :
M. RIZKY RAYES LESMANA
NIM. 07011282126062

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 16 Mei 2025

Pembimbing : Tanda Tangan

1. Dr. Katriza Imania., M.Si
NIP. 196810221997022001

Penguji : Tanda Tangan

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

2. Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 197808182009121003

Mengetahui,

DEKAN FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Administrasi Publik

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : M. Rizky Rayes Lesmana
NIM : 07011282126062
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul " Penguatan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan terhadap Peraturan Daerah" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menaggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sunguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 2 Mei 2025

M. Rizky Rayes Lesmana

NIM.07011282126062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Every situation in life is temprorary. So, when life is good, make sure you enjoy & receive it fully. When life is not so good. Remember that it will not last forever and better days are on the way."

Atas Ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, Papa dan Mama
2. Seluruh keluarga besar yang saya cintai
3. Seluruh Dosen dan Staf FISIP Universitas Sriwijaya
4. Rekan Seperjuangan Mahasiswa Administrasi Publik 2021
5. Almamater Kebanggaan

ABSTRACT

This research is titled "Institutional Strengthening of the Regional People's Representative Council of Palembang City in Optimizing the Oversight Function of Regional Regulations." The purpose of this study is to analyze the extent to which institutional strengthening has been carried out to enhance the DPRD's oversight function in monitoring the implementation of regional regulations. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature review. The analysis is based on the five institutional dimensions proposed by Deborah Eade, namely human resources, organizational structure, financial capacity, infrastructure, and collaboration. The findings indicate that although the DPRD of Palembang City has established a formal institutional structure, it still faces various functional challenges. Technical competencies among DPRD members remain uneven, and there is no performance evaluation system in place. Oversight activities tend to be reactive and are often driven by public complaints or media attention. There is no specific budget allocation for oversight functions, making efficiency difficult to measure. While physical infrastructure is adequate, some facilities require renovation, and the use of information technology is not yet integrated into a comprehensive oversight system. Public participation remains incidental and unstructured, and collaboration with external stakeholders has not yet developed into strategic partnerships. This study recommends a multidimensional approach to institutional strengthening to enable the DPRD to carry out its oversight functions more effectively, adaptively, and accountably.

Keywords: DPRD, Oversight Function, Institutional Strengthening, Regional Regulation, Public Administration.

Advisor

Dr. Katriza Imania, M.Si

NIP. 196810221997022001

Knowing,

Head of Department

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *"Penguatan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan terhadap Peraturan Daerah."* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penguatan kelembagaan DPRD telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis penelitian didasarkan pada lima dimensi kelembagaan menurut teori Deborah Eade, yaitu sumber daya manusia, organisasi, keuangan, infrastruktur, dan kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, kelembagaan DPRD Kota Palembang telah terbentuk secara lengkap, namun secara fungsional masih menghadapi berbagai tantangan. Kompetensi teknis anggota DPRD belum merata, sistem evaluasi kinerja belum tersedia, dan pengawasan masih bersifat reaktif. Tidak terdapat anggaran khusus untuk pengawasan, serta efisiensi penggunaan dana belum dapat diukur secara objektif. Infrastruktur kerja dinilai memadai namun membutuhkan pembaruan, sementara pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan sistem kerja pengawasan. Partisipasi masyarakat belum dilembagakan secara formal, dan kolaborasi dengan pihak eksternal belum berbentuk kemitraan strategis. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan secara multidimensional agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif, adaptif, dan akuntabel.

Kata Kunci: DPRD, Pengawasan, Penguatan Kelembagaan, Peraturan Daerah, Administrasi Publik.

Pembimbing

Dr. Katriza Imania, M.Si
NIP. 196810221997022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tiada henti. Berkat pertolongan dan izin-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Penguatan Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan terhadap Peraturan Daerah". Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak sedikit tantangan dan hambbatan yang harus dilalui, Namun berkat dorongan, dukungan moral, serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skrispsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas izin serta kehendak-Nya, Penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi ini dengan baik hingga mencapai tahap akhir.
2. Kedua orang tua tercinta, saudara yang telah memberikan kasih sayang tulus, kesabaran tanpa batas, dan doa yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
6. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik
7. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan, selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran dan

masukan yang diberikan sangat berarti dan menjadi kontribusi besar dalam penyempurnaan skripsi ini.

8. Seluruh informan dan pihak di DPRD Kota Palembang, khususnya bapak Rodhi Shabirin, SE, yang telah bersedia meluangkan waktu, berbagi informasi, serta mendukung proses pengumpulan data dengan baik.
9. Kepada yang terkasih, Ratu Septya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. selalu ada dalam keadaan apapun, mendukung dan membantu penulis membuat semuanya menjadi lebih mudah jika bersama denganmu. Semoga Allah memberi keberekahan, kemudahan, dan kelancaran untuk perjalanan kita selanjutnya.
10. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik angkatan 2021 yang telah saling mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang. Di akhir tulisan ini, penulis juga berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi yanng signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

Indralaya, 2 Mei 2025

M.Rizky Rayes Lesmana

NIM. 07011282126062

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ..... **ii**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 14

1.3 Tujuan dan Manfaat 15

1.3.1 Tujuan Penelitian 15

1.3.2 Manfaat Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... Error! Bookmark not defined.

2.1. Landasan Teori ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.2 Manajemen Publik ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.3 Kelembagaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.4 Penguatan Kelembagaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.5 Teori Penguatan Kelembagaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.6. Teori yang Digunakan dalam Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.7 Fungsi Pengawasan DPRD Kota Palembang ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.7.1 Ruang Lingkup Fungsi Pengawasan DPRD ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.7.2 Dampak Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintahan Kota Palembang ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.8 Peraturan Daerah dan Pentingnya Pengawasan ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.8.1 Peraturan Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.8.2 Asas Pembentukan Perda ..... **Error! Bookmark not defined.**

2.8.3 Proses Penyusunan Perda ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.9 Pentingnya Pengawasan Peraturan Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.9.1 Pengawasan Preventif ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.9.2 Pengawasan Represif ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.10 Kerangka Berpikir ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.11 Penelitian Terdahulu ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.12 Asumsi Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III METODE PENELITIAN ..... Error! Bookmark not defined.
3.1 Desain Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2 Definisi Konsep ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.3 Fokus Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4 Tempat & Jadwal Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.5 Informan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.6 Sumber Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.7 Teknik Pengumpulan Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.8 Teknik Analisis Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.9 Keabsahan Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.10 Sistematika Penulisan ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... Error! Bookmark not defined.
4.1 Profil Instansi ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.1.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang **Error! Bookmark not defined.**
4.1.2 Visi dan Misi ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.1.3 Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang .... **Error! Bookmark not defined.**
4.2 Informan Penelitian Saat di Lapangan ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3 Hasil Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.1 Sumber daya manusia ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.2 Organisasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.3 Keuangan ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.4 Infrastruktur ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.3.5 Kerjasama ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.4 Pembahasan ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB V PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.2 Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.2.1 Saran Praktis ..... **Error! Bookmark not defined.**
5.2.2 Saran Teoritis ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR PUSTAKA 16
LAMPIRAN ..... Error! Bookmark not defined.
Lampiran 1 Pedoman Wawancara ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 2 SK Skripsi..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 4 Lembar Konsultasi Usulan Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 5 Lembar Perbaikan Seminar Proposal ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 6 Lembar Konsultasi Skripsi ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 7 Lembar Perbaikan Komprehensif..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 8 Bukti Turnitin ..... **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi secara umum merupakan wadah atau tempat bagi sekelompok orang untuk bekerja sama secara terkendali dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi sebagai suatu entitas yang memiliki fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian Fayol, H (dalam Alfina Febriyani & Nur Anisa, 2023). Ia menekankan pentingnya fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi, setiap anggota memberikan sumbangan tenaga dan usahanya, serta terdapat kewenangan, koordinasi, dan pengawasan.

Organisasi publik adalah organisasi yang memperoleh mandat dari pemerintah, dibiayai oleh pemerintah seerta mempunyai misi yang harus dipenuhi (Fredriksson & Pallas, 2018). Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam operasionalnya, sehingga dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Salah satu wujud nyata organisasi publik adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan penyusunan dan penetapan peraturan daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum bagi tata kelola pemerintahan daerah, sedangkan fungsi anggaran melibatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tepat sasaran dan transparan. Di sisi lain, fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan dan peraturan daerah berjalan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Sebagai organisasi publik, DPRD memiliki tanggung jawab untuk merancang dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum bagi berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah. Selain itu, DPRD menjalankan fungsi anggaran dengan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar penggunaan sumber daya publik berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam fungsi pengawasannya, DPRD memastikan bahwa pelaksanaan program-program pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pengertian ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD berperan penting dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) bersama kepala daerah, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, serta memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPRD juga menjadi saluran aspirasi rakyat di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat. Dengan kedudukannya yang sejajar dengan kepala daerah, DPRD mencerminkan prinsip

demokrasi dan *check and balance* dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional, DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan daerah (Perda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Berikut ini adalah data tentang jumlah Peraturan Daerah yang sudah dikeluarkan oleh DPRD Kota Palembang selama 5 tahun kebelakang terhitung sejak tahun 2019-2024.

Tahun	**Jumlah Perda yang dikeluarkan**	**Keterangan**		
		Di ubah	**Berlaku**	**Peraturan Baru**
2019	10	0	10	0
2020	11	0	11	0
2021	4	0	4	0
2022	13	1	11	1
2023	1	0	1	0
2024	0	0	0	0
Jumlah	39	1	37	1

Tabel 1.1 Data Peraturan Daerah yang dikeluarkan DPRD Kota Palembang Tahun 2019-2024

Sumber jdihkotapalembang.com

Dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan DPRD sering kali menghadapi tantangan dan kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama yang sering dihadapi adalah lemahnya kapasitas kelembagaan DPRD. Observasi menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota DPRD yang beragam

berkontribusi terhadap kurang optimalnya pemahaman mereka mengenai tugas dan fungsi pengawasan. Banyak anggota DPRD yang belum sepenuhnya memahami konsep pengawasan secara komprehensif sehingga kinerja pengawasan sering kali tidak efektif. Selain itu, prioritas politik yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu sering kali menghambat pelaksanaan pengawasan yang objektif dan independen. Kelemahan dalam tata kelola alat kelengkapan DPRD juga menjadi penghambat yang signifikan. Alat kelengkapan seperti komisi, panitia anggaran, dan panitia khusus belum dioptimalkan secara maksimal dalam mendukung fungsi pengawasan. Keterbatasan ini sering kali diperburuk oleh tata tertib internal DPRD yang belum dirumuskan dengan jelas, sehingga menyebabkan proses pengawasan kehilangan arah dan tidak menghasilkan rekomendasi yang konkret. Hal ini berdampak langsung pada tidak tercapainya tujuan pengawasan, yakni mendorong pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan amanat undang-undang dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Kota Palembang, tantangan-tantangan tersebut menjadi semakin relevan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Palembang menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga tata ruang wilayah. Peran DPRD Kota Palembang dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mencerminkan kepentingan masyarakat. Pengawasan DPRD juga diperlukan untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan mengurangi efektivitas program pembangunan.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa lemahnya fungsi pengawasan DPRD tidak hanya terjadi di Kota Palembang, tetapi juga di daerah lain seperti Kota Semarang (Chabib Faturrohman et al., 2023) dan Kota Pare-Pare (Kusumah & Siregar, 2020). Hasil penelitian di Kota Semarang menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten serta adanya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah. Sementara itu, di Kota Parepare menyoroti pentingnya pendidikan dan pengalaman anggota DPRD dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak hanya bersifat monitoring, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem peringatan dini *(early warning system)*. Pengawasan yang proaktif dapat membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan. Dalam kerangka ini, DPRD tidak hanya bertugas memantau pelaksanaan peraturan daerah, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Palembang menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam menjalankan peran strategis ini. Masalah-masalah tersebut dapat dianalisis dari beberapa aspek utama, yakni tingkat individu, organisasi, serta jaringan atau lingkungan eksternal yang berhubungan langsung dengan fungsi pengawasan. Pada tingkat individu, tantangan utama terletak pada kapasitas dan kompetensi anggota DPRD. Latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam sering kali menyebabkan perbedaan pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan. Beberapa anggota DPRD

masih kurang memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara mendalam, yang berdampak pada minimnya efektivitas pengawasan. Selain itu, motivasi kerja dan potensi konflik kepentingan menjadi penghambat lain yang memengaruhi objektivitas dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah. Di tingkat organisasi, kelemahan dalam koordinasi internal antara alat kelengkapan DPRD, seperti komisi-komisi dan badan-badan yang ada, menjadi kendala yang cukup signifikan. Komunikasi yang kurang efektif antar-komponen ini sering kali menghambat pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi. Di samping itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga ahli, data yang relevan, maupun anggaran yang memadai, memperlemah situasi. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan juga menjadi masalah krusial, karena kurangnya dokumentasi yang baik membuat evaluasi atas pelaksanaan fungsi ini sulit dilakukan. Pada tingkat jaringan atau lingkungan, hubungan antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sorotan utama. Sinergi yang belum optimal antara kedua pihak ini mengakibatkan terhambatnya akses informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan yang efektif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD juga masih minim. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pengawasan langsung maupun pelaporan dari masyarakat terkait pelaksanaan peraturan daerah. Selain itu, dinamika politik, seperti konflik antar-partai politik dan perbedaan kepentingan, sering kali memengaruhi obyektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Secara regulasi dan implementasi, pelaksanaan fungsi pengawasan juga dihadapkan pada kelemahan dalam penegakan peraturan daerah. Beberapa perda tidak dilengkapi dengan perangkat pendukung yang memadai, sehingga sulit untuk

diawasi implementasinya di lapangan. Lemahnya sistem evaluasi dan monitoring semakin memperburuk situasi, karena dampak dari pengawasan yang dilakukan tidak dapat diukur dengan jelas. Konteks eksternal seperti pengaruh lobi dan kepentingan ekonomi juga menambah kompleksitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Lobi-lobi tertentu dapat mengganggu independensi DPRD dalam mengambil keputusan, sehingga menurunkan kualitas pengawasan yang dilakukan. Selain itu, persepsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja DPRD turut melemahkan legitimasi mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah oleh DPRD Kota Palembang masih belum maksimal sehingga perlu dilakukan penguatan kelembagaan atau kapasitas organisasi. Hal inilah yang menarik untuk diteliti. Urgensi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ini tercermin dalam kutipan salah satu jurnal yang menyatakan bahwa, "DPRD harus dapat menjadi alat kontrol bagi jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" (Chabib Faturrohman et al., 2023) Selain itu, optimalisasi alat kelengkapan DPRD, seperti pembentukan panitia khusus dan penyusunan tata tertib yang lebih jelas, menjadi langkah penting yang perlu segera dilakukan untuk memperkuat fungsi pengawasan.

Deborah Eade (1998) merumuskan Penguatan kapasitas organisasi akan berjalan secara maksimal apabila memenuhi lima aspek, yaitu: (1) Sumber daya manusia (2) Organisasi (3) Keuangan (4) Infrastruktur (5) Kerjasama Eade, D (1998), (Dalam Mutiarin, Dyah 2014). Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam penguatan kapasitas organisasi. Hal ini mencakup kompetensi,

keterampilan, pengalaman, dan motivasi individu yang terlibat dalam organisasi. Penguatan kapasitas dalam aspek ini berfokus pada pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesional untuk memastikan setiap anggota organisasi mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan produktif. Organisasi adalah struktur, sistem, dan mekanisme kerja yang mengatur bagaimana suatu kelompok bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan. Penguatan kapasitas pada aspek ini melibatkan pembenahan tata kelola, peningkatan efisiensi proses internal, dan pengembangan budaya kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pencapaian tujuan strategis. Keuangan merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya finansial secara transparan dan akuntabel. Ini mencakup perencanaan anggaran, penggalangan dana, serta pelaporan keuangan yang bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan operasional organisasi. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana fisik maupun teknologi yang mendukung operasional organisasi. Aspek ini mencakup fasilitas kantor, peralatan, teknologi informasi, dan sistem pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung kinerja organisasi secara optimal. Kerjasama adalah kemampuan organisasi untuk menjalin hubungan dan membangun kemitraan dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Hal ini mencakup koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan mitra strategis seperti lembaga pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan donor untuk mencapai tujuan bersama.

Penelitian terkait penguatan organisasi sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tentang penguatan organisasi mengaitkan dengan kebijakan publik, seperti (Ismail et al., 2020) meneliti penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang), Penelitian tersebut menyoroti Penguatan organisasi sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks pengarusutamaan gender dan anak di Kabupaten Karawang, peningkatan kapasitas organisasi, pemahaman pegawai, dan penerapan kebijakan yang konsisten akan berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, penguatan organisasi dan implementasi kebijakan saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Penelitian yang serupa juga mengaitkan penguatan kelembagaan dengan aspek manajemen publik, seperti penguatan kelembagaan komisi aparatur sipil negara sebagai penjaga sistem merit dalam manajemen asn di indonesia (Anggoro, 2022), Penelitian ini menekankan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu diperkuat sebagai lembaga yang berfungsi menjaga dan menerapkan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Wacana penghapusan KASN menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan sistem merit yang esensial untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan KASN sangat penting dalam konteks kebijakan publik. Hal ini akan meningkatkan efektivitas lembaga dalam menjaga sistem merit, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan demikian, KASN yang diperkuat akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan responsif terhadap masyarakat.

Penelitian penguatan organisasi juga mengaitkan aspek manajemen publik, seperti penguatan organisasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima (Studi di Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru) (Haris et al., 2024), Penelitian

tersebut menekankan bahwa penguatan organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam aspek manajemen publik. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penguatan organisasi yang baik, seperti kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang baik, dan budaya organisasi yang positif, manajemen publik dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Penelitian yang serupa juga mengaitkan penguatan kelembagaan dengan aspek manajemen publik, seperti Strategi penguatan kapasitas anggota dprd di kota sukabumi *capacity building strategies on member of local legistative council in sukabumi city* (Saleh et al., 2021)*,* Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas anggota DPRD di Kota Sukabumi, yang merupakan bagian dari manajemen publik. Manajemen publik berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas anggota DPRD di Kota Sukabumi masih belum optimal, dengan faktor penghambat seperti kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai, kompetensi yang lemah, dan rendahnya motivasi kerja. Untuk meningkatkan kapasitas tersebut, jurnal ini mengusulkan strategi penguatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan komitmen bersama. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas anggota DPRD untuk meningkatkan kinerja manajerial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik.

Penelitian tentang penguatan organisasi juga mengaitkan fungsi DPRD, seperti Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD (Anyang &

Fathurrahman, 2024), Penelitian menunjukkan bahwa penguatan organisasi DPRD sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi mereka. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya tim ahli, pelatihan, dan dukungan administratif yang memadai, DPRD dapat menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan dengan lebih efektif. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian yang serupa juga mengaitkan penguatan organisasi dengan aspek fungsi DPRD, seperti penguatan fungsi legislasi anggota dprd kabupaten sarolangun melalui pemahaman tentang metode omnibuslaw (Putra et al., 2024), Penelitian ini menyatakan bahwa kapasitas anggota DPRD di Kabupaten Sarolangun masih rendah, yang berdampak pada efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Rendahnya inisiatif anggota DPRD dalam pembuatan peraturan daerah menjadi salah satu masalah utama. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan DPRD sangat penting untuk meningkatkan efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan meningkatkan kapasitas anggota DPRD, memperkuat dukungan sistem, dan melibatkan masyarakat, DPRD dapat berfungsi secara optimal dalam mewakili kepentingan publik dan menciptakan peraturan daerah yang berkualitas. Penguatan ini akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih efektif di Kabupaten Sarolangun.

Penelitian tentang penguatan organisasi juga mengaitkan fungsi pengawasan DPRD, seperti penguatan fungsi pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) terhadap efektifitas peraturan daerah (Kusumah & Siregar, 2020), Penelitian menunjukkan bahwa Penguatan organisasi DPRD sangat penting untuk

mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan mereka. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya tim ahli, pelatihan, dan dukungan administratif yang memadai, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat terjaga dengan baik. Penelitian yang serupa juga mengaitkan penguatan organisasi dengan aspek fungsi pengawasan DPRD, seperti penguatan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten buton selatan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang md3 (Faharudin, 2025), Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas anggota DPRD di Kabupaten Buton Selatan masih terbatas, yang mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Banyak anggota DPRD yang belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem pemerintahan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan DPRD sangat penting untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Dengan meningkatkan kapasitas anggota DPRD, memperkuat dukungan sistem, dan melibatkan masyarakat, DPRD dapat berfungsi secara optimal dalam mewakili kepentingan publik dan menciptakan peraturan daerah yang berkualitas. Penguatan ini akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih efektif di Kabupaten Buton Selatan.

Penelitian yang serupa juga mengaitkan penguatan organisasi dengan aspek fungsi pengawasan DPRD, seperti penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indrgiri hilir terhadap penanggulangan covid-19 (Jamri,

2020), Penelitian ini menyatakan bahwa fungsi legislasi DPRD di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari minimnya produk legislasi yang dihasilkan, khususnya dalam konteks penanggulangan COVID-19. DPRD terkesan pasif dan tidak mampu menginisiasi peraturan daerah yang relevan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan DPRD sangat penting untuk meningkatkan efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan meningkatkan kapasitas anggota DPRD, memperkuat dukungan sistem, dan melibatkan masyarakat, DPRD dapat berfungsi secara optimal dalam mewakili kepentingan publik dan menciptakan peraturan daerah yang berkualitas. Penguatan ini akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih efektif di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya lebih menekankan pada aspek-aspek lain dari manajemen publik atau fungsi legislatif secara umum. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada Penguatan Kelembagaan dalam lokus DPRD Kota Palembang dengan konteks pengoptimalan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah, yang merupakan salah satu tugas krusial DPRD. Dengan menggunakan teori penguatan organisasi yang dikemukakan oleh Deborah Eade (1998), penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana penguatan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, dan kerjasama di DPRD Kota Palembang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang

dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pentingnya penguatan organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: "Penguatan Kelembagaan DPRD Kota Palembang dalam Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah" Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk menjawab tantangan lokal yang dihadapi oleh Kota Palembang, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi acuan bagi penguatan kelembagaan DPRD di daerah lain. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam Penelitian ini, yaitu "Bagaimana penguatan kelembagaan DPRD Kota Palembang dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah?"

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Memahami, mengidentifikasi dan menganalisis Penguatan kelembagaan DPRD Kota Palembang dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan Administrasi Publik, khususnya terkait penerapan teori penguatan organisasi di Lembaga legislatif.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi DPRD dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kendala dan potensi penguatan kelembagaan, DPRD dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas pengawasan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Alfina Febriyani, S., & Nur Anisa, S. (2023). Prinsip teori organisasi klasik menurut henry fayol. In *Jurnal Manajemen Strategis* (Vol. 1, Issue 1). https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/mantra/article/view/93

Anggoro, F. N. (2022). Penguatan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Penjaga Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Indonesia. In *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* (Vol. 1, Issue 02). Desember. https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jhhws.v1i02

Anyang, Y., & Fathurrahman, R. (2024). Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Penyediaan Tim Ahli/Tim Pakar dan Tenaga Ahli dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD. *JIHHP*, *4*(5). https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5

Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.*

Bagir Manan. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,: Pusat Studi Hukum (PSH), Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001*.

Chabib Faturrohman, M., Sudarmanto, K., Junaidi, M., & Sukimin, S. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah. In *Jurnal Juridisch* (Vol. 1, Issue 1). http://journal.usm.ac.id/index.php/juridisch

Eade, D. (1998). *Capacity Building: An approach to people-centered development.*

Faharudin. (2025). *penguatan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten buton selatan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang md3*. *https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/fasya-abdimas/issue/view/124*. https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/fasya-abdimas/issue/view/124

Fredriksson, M., & Pallas, J. (2018). Public Sector Communication. In *The International Encyclopedia of Strategic Communication* (pp. 1–10). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0141

Haris, M., Enggok, M. S., & Rahayu, I. (2024). *Penguatan organisasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima (studi di kecamatan kelumpang barat kabupaten kotabaru)*. https://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23315

Haryono, B. S. , S. Z. S. , & S. B. (2012). *Pembangunan Kapasitas (Capacity Building).*

Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik . September*.

Ismail, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2020). Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). *Jurnal MODERAT*, *6*(4). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i4.4549

J. Steven Ott, A. C. H. J. M. S. (1991). *Public management : the essential readings*.

Jamri. (2020). *Penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indrgiri hilir terhadap penanggulangan covid-19*. https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v4i2

Keban, Y. T. ,. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*.

Kusumah, R. R., & Siregar, S. B. (2020). penguatan peran dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten buton selatan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2019 tentang md3. *Jurnal Yustitia*.

Miles B, M. , H. M. A. , & S. J. (2020). *Qualitative Data Analysis* . *21*(1).

Mutiara. (2013). *Pengembangan Kapasitas organisasi (Capacity Building)*.

Mutiarin, D. (2014). *Organisasi Publik dan Perkuatan Kelembagaan*.

Notoatmodjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.

Putra, F., Syufradian Putra, D., & Subekti, D. (2024). Penguatan Fungsi Legislasi Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Melalui Pemahaman tentang Metode Omnibuslaw. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, *1*(1). https://doi.org/10.22437/jphk.v1i1.38959

Riduwan. (2012). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika. Bandung: Alfabeta.*

Saleh, M., Harits, B., & Suardi, S. (2021). *Strategi penguatan kapasitas anggota dprd di kota sukabumi capacity building strategies on member of local legistative council in sukabumi city*. http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/53443

Sellag, K. (2016). *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*.

Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*

Soehino. (1997). *Hukum Tata Negara : Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah , Liberty, Yogyakarta, 1997.*

UNDP. (2015). *Pengembangan Kapasitas: Pengantar UNDP*.

Uphoff, N. (1986). *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases.*

Wardani & Anwarudin, O. (2018). Peran penyuluh terhadap penguatan kelompok tani dan regenerasi petani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Jurnal Tabaro*, *2*(1), 191–200.